

## **MODEL PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENEGAH (UKM) BERBASIS DANA DESA**

**Falikhatun, Salamah Wahyuni, Muthmainah, Muhammad Cholil**

**Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Universitas Sebelas Maret**

[fallie.feuns17@gmail.com](mailto:fallie.feuns17@gmail.com), [salamah.wahyuni@gmail.com](mailto:salamah.wahyuni@gmail.com),

[muthmainah.ekis@gmail.com](mailto:muthmainah.ekis@gmail.com), [mcholil2014@gmail.com](mailto:mcholil2014@gmail.com)

### **Abstract**

*The empowerment of SMEs is an effort by the Government, Regional Government, the Business World, and the synergy of community in the form of climate growth and business development for MSMEs, so that they can grow and develop into strong and independent businesses. Two groups of MSMEs that are already operating in Simo District are the Balung Kethek and the Eel and Cassava Chips (Keripik Belut, Keripik Singkong). This business group, which consists of housewives, is quite stretched along with the existence of social media that can be used to increase sales turnover. However, the capacity of these housewives is very limited in managing their businesses, as evidenced by their lack of knowledge about business management and finance, including knowledge about sources of capital. This community service aims to find a model for empowering MSMEs that uses the allocation of Village Fund. For the implementation, this service through several steps, namely observing several MSMEs in Simo District, Boyolali Regency. Furthermore, a Focus Group Discussion was conducted. This FGD aims to find a model for empowering MSMEs that suits the conditions of the communities by used sources of financing based on village fund. The results of the FGD by inviting various groups including from Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) concluded that the empowerment of Village Fund-based UKM could only be done if the UMKM was established by community-based communities, such as the Farmer Community, the Majelis Taklim community, the Artist Communists, and others. In other words, village fund-based UKM empowerment can only be done by forming a Kelompok Usaha Bersama (KUBE). The next step of service is the socialization of digital-based marketing management, a simple accounting system, and the socialization of procedures for applying for halal certification.*

*Keywords: Balung Kethek, Village Fund, Eel Chips, Empowerment*

### **Abstrak**

Pemberdayaan UKM adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Dua kelompok UMKM yang sudah beroperasi di Kecamatan Simo adalah UMKM Balung Kethek dan UMKM Keripik Belut dan Singkong. Kelompok Usaha yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga ini cukup menggeliat seiring dengan adanya media sosial yang dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan omset penjualan. Namun, kemampuan para ibu rumah tangga ini sangat terbatas dalam pengelolaan usahanya, terbukti dengan minimnya pengetahuan mereka tentang manajemen dan keuangan bisnis, termasuk pengetahuan tentang sumber-sumber permodalan. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mencari model pemberdayaan UKM yang memanfaatkan alokasi Dana Desa. Dalam pelaksanaannya, pengabdian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu melakukan observasi ke beberapa UMKM di wilayah Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali. Selanjutnya dilakukan *Focus Discussion Group*. FGD ini bertujuan untuk mencari model pemberdayaan UKM yang sesuai dengan kondisi masyarakat perdesaan dengan memanfaatkan

sumber pembiayaan berbasis dana desa. Hasil FGD yang dilakukan dengan mengundang berbagai kalangan termasuk dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) menyimpulkan bahwa pemberdayaan UKM berbasis Dana Desa hanya dapat dilakukan apabila UMKM didirikan oleh masyarakat yang berbasis pada komunitas, seperti Komunitas Petani, komunitas Majelis Taklim, Komunitas Seniman dan lain-lain. Dengan kata lain, pemberdayaan UKM yang berbasis dana desa hanya dapat dilakukan dengan pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Tahapan pengabdian berikutnya adalah sosialisasi manajemen pemasaran berbasis digital atau Digital marketing, sistem akuntansi sederhana, dan sosialisasi prosedur pengajuan sertifikasi halal.

**Kata Kunci:** *Balung Kethek, Dana Desa, Keripik Belut, Pemberdayaan*

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Meskipun sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya belum menggembirakan. Data Biro Pusat Statistik bulan Maret 2019 menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia masih sebanyak 25,94%. Beberapa faktor penyebab kemiskinan, antara lain tingkat pendidikan yang rendah, semakin berkurangnya sumber daya alam, terbatasnya lapangan kerja, beban hidup keluarga, dan malas bekerja (Abdi, 2019).

Salah satu faktor terjadinya kemiskinan kultural adalah adanya sifat malas bekerja bagi sebagian masyarakat dan hal itu disadari betul oleh pemerintah. Untuk mengatasinya, kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menjadikan desa sebagai titik tolak pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Republik Indonesia, 2014). Selain Undang-undang Desa, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang menjadikan perekonomian desa menjadi pondasi dalam memajukan perekonomian Indonesia. Undang-undang dan Peraturan Menteri tersebut memberikan kesempatan dan

sumber dana yang memadai untuk menunjang usaha peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pentingnya perubahan paradigma berfikir masyarakat menunjukkan perubahan dari pendekatan pertumbuhan menjadi pendekatan kemandirian (Imron, Suaedy, & Ribawanto, 2014). Salah satu cara untuk mengimplementasikan konsep kemandirian masyarakat adalah dengan menciptakan, memberdayakan dan mengembangkan UMKM, dikarenakan UMKM berperan dalam mengatasi pengangguran (Hidayat, 2016). Selanjutnya menurut UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyiratkan beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam upaya pemberdayaan UKM, antara lain akses pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.

Dalam upaya pemberdayaan ini, tentu saja pihak pemberdaya dan masyarakat harus bekerja sama untuk meningkatkan kualitas diri, baik dalam aspek pengelolaan usaha maupun dalam aspek pendanaan. Pemerintah Daerah sebagai salah satu aktor utama juga sangat berperan dalam mengembangkan program-program pemberdayaan UMKM. Hasil riset yang dilakukan *International Finance Corporation – World Bank Group* (2016) menyimpulkan bahwa UMKM yang dimiliki oleh perempuan di Indonesia merupakan suatu kesempatan emas bagi

institusi keuangan lokal dalam upaya pemberdayaan UMKM. Lebih lanjut Dahlan (2017) menyimpulkan bahwa inovasi dan pemahaman terhadap perubahan lingkungan eksternal berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM.



Salah satu UMKM di Kecamatan Simo, tepatnya berada di desa Temon, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, adalah UMKM Balung Kethek. UMKM ini bersifat usaha perseorangan yang mulai berdiri pada tahun 2015, dikelola oleh seorang perempuan, yaitu ibu Jumiyanti. Ibu ini merasa resah dengan adanya panen singkong di daerahnya yang berlimpah, namun belum diolah menjadi produk hasil pertanian yang *marketable*. Selama ini sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh ibu Jumiyanti, singkong hanya digunakan untuk pakan ternak saja, padahal singkong di desa Temon mempunyai kualitas yang cukup baik. Hasil olah pikir yang dilakukan oleh ibu Jumiyanti dan keluarga menghasilkan camilan berbahan baku local (*Local Content Product*) yaitu Balung Kethek.

Selain UMKM Balung Kethek, usaha rumahan yang dilakukan oleh perempuan lain ada di desa Wates, Kecamatan Simo adalah UMKM Belut dan Keripik Daun Singkong. Usaha yang dikelola oleh ibu Listiyani juga diawali dengan keprihatinan dia terhadap banyaknya belut

yang muncul di sawah-sawah ketika musim hujan dan banyaknya daun singkong yang kurang dimanfaatkan. Ketersediaan belut dan daun singkong yang melimpah menjadikan ibu Listiyani berfikir untuk dijadikan peluang usaha. Selanjutnya pada tahun 2016, bersama dengan keluarga dan tetangga-tetangga di sebelah rumahnya, mereka mencoba untuk mengelola belut dan daun singkong tersebut menjadi keripik. Awalnya, usaha ini hanya dinikmati oleh tetangga sekitar, namun lama kelamaan usaha ini terus berkembang sampai saat ini.

Hasil observasi langsung dan wawancara mendalam dengan kedua pemilik UMKM, ibu Jumiyanti dan ibu Listiyani mengungkapkan sebenarnya banyak produk yang dapat dikembangkan untuk lebih memberdayakan usaha di desa Temon dan Desa Wates. Usaha yang dijalankan selama ini hanya sebatas pengetahuan dan pemikiran yang sangat sederhana, misalnya singkong dibuat Balung Kethek, Keripik daun singkong dan Keripik Belut, atau masih sebatas produk keripik. Belum ada pengetahuan lain yang diperoleh pemilik untuk membuat produk-produk yang lebih variatif. Dengan kata lain, para pemilik UMKM tidak memiliki pengetahuan tentang diversifikasi produk dari singkong ini. Demikian pula dengan alat produksi yang digunakan masih sangat sederhana dan bersifat manual, sehingga kalah bersaing dengan usaha swasta. Masalah lain adalah belum semua produk yang dihasilkan bersertifikasi halal, sekalipun bahan utama adalah singkong yang pasti halal, namun ada bahan tambahan yang digunakan dalam proses produksi, sehingga perlu diuji kehalalannya.



Gambar 1. Wawancara dan Observasi UMKM

Selain masalah-masalah tersebut, masalah yang sangat krusial adalah permodalan. Selama ini modal usaha berasal dari pemilik sendiri dan ada sebagian yang berasal dari pembiayaan yang didapatkan dari *Baitul Maal wa tamwil* (BMT) yang ada di Kecamatan Simo. Namun besaran dana pembiayaan dari BMT sangat terbatas, karena perlunya agunan. Oleh karena itu, pengabdian ini juga bertujuan untuk mencari peluang sumber permodalan lain termasuk dari Dana Desa.

#### METODE PELAKSANAAN

Proses pengabdian dilakukan dengan metoda *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Metoda ini mengedepankan proses pendampingan secara partisipatif dari seluruh UMKM. Adapun tahapan yang dilakukan dalam pendampingan meliputi:

1. Tahap Persiapan, meliputi pembentukan tim pendamping disertai dengan penjelasan tentang tupoksi untuk masing-masing pendamping.
2. Melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada beberapa UMKM

di wilayah desa Temon dan desa Wates.

3. Tahap Pelaksanaan *Focus Discussion Group* (FGD) dilakukan dengan melakukan dengar pendapat dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dari perangkat desa Temon dan Wates, aparat kecamatan Simo dan aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Boyolali.
4. Pemberian materi tentang Model-model pemberdayaan UKM berbasis dana desa, dan materi-materi yang terkait dengan Penganggaran, Pemasaran Digital, dan Pelaporan keuangan berbasis ETAP, termasuk Sosialisasi tentang pengajuan Sertifikasi Halal.
5. Tahap Evaluasi, dilakukan dengan membandingkan antara rencana kerja dengan realisasi kerja dan memberikan analisis tentang kendala-kendala yang dihadapi dan pemberian solusi yang dibutuhkan.
6. Tahap Pelaporan dan Desiminasi, dilakukan pada dengan menyusun laporan dan melakukan desiminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PKM).

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengumpulan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha beberapa UMKM mendeskripsikan bahwa pengemasan hasil produksi masih sangat sederhana, media pemasaran masih menggunakan cara manual yaitu dititipkan di warung-warung sekitar UMKM dan diambil oleh beberapa tengkulak untuk dijual di pasar-pasar tradisional. Berikut beberapa hasil produksi kedua UMKM tersebut.



Gambar 2 Hasil Produksi Balung Kethek



Gambar 3 Hasil Produksi Kepruk Belut dan Keripik Daun Singkong

Selanjutnya dari hasil wawancara mendalam menghasilkan beberapa informasi tentang metoda pemasaran, sumber permodalan serta data-data yang terkait dengan biaya produksi. Hasil pengolahan data-data keuangan tersebut apabila disusun dalam laporan Laba Rugi masih sangat sederhana dan tidak mengakomodasi seluruh elemen biaya produksi. Berikut salah satu hasil dokumentasi Laporan Keuangan yang disajikan UMKM.

Tabel 1 Contoh Laporan Keuangan UMKM XXX di Kecamatan Simo

Laporan keuangan Laba Rugi Usaha tahun 2019		
Pendapatan:		
Penjualan Kotor Rp. 350.000 x 30 hari	Rp	10.500.000
Biaya-biaya:		
Bahan baku daun singkong (3 pcs x 15.000 x 30)	Rp	1.350.000
Tepung beras (1 dus x 120.000 x 15 hari)	Rp	180.000
Tenaga (1 orang x Rp. 35.000 x 30 hari)	Rp	1.050.000
Minyak Goreng (6 lt x 12.000 x 30 hari)	Rp	2.160.000
Telur ayam (1 kg x 30 x 23.000)	Rp	690.000
Pembungkus plastik	Rp	300.000
Bumbu dapur	Rp	150.000
Listrik	Rp	100.000
Air	Rp	40.000
Transport	Rp	300.000
Isolasif (2 x bulan)	Rp	25.000
Gas 3 kg ( 1 x 30 hari)	Rp	600.000
<b>Total biaya-biaya</b>	<b>Rp</b>	<b>6.945.000</b>
<b>Total laba bersih satu bulan</b>	<b>Rp</b>	<b>3.555.000</b>
<b>Total laba bersih satu tahun</b>	<b>Rp</b>	<b>42.660.000</b>

Sumber: Perhitungan berdasarkan hasil wawancara

Tahapan berikutnya adalah melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) yang diadakan pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, diikuti oleh seluruh *stakeholder* yang terkait dengan pemberdayaan UMKM di Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali. Beberapa pihak yang hadir pada *FGD* antara lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes), Camat Kecamatan Simo, Kepala Desa Temon, Kepala Desa Wates, Badan Perwakilan Desa (BPD), Tim Pelaksana Dana Desa dan Perwakilan UMKM di sekitar Kecamatan Simo, serta Tim Pengabdian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret.



Gambar 5 Para Peserta FGD



Gambar 4 Narasumber *Foccus Group Discussion*

Hasil diskusi dengan *stakeholder* pada akhir *FGD* menyimpulkan beberapa hal, antara lain: (1) Program pemberdayaan desa Temon dan desa Wates dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), terutama dari hasil usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dimiliki oleh masing-masing desa, (2) Desa Temon memiliki BUMDes yang bergerak di bidang penjualan material bangunan seiring dengan banyaknya kebutuhan pembangunan infrastruktur yang dilakukan desa, sedangkan desa Wates memiliki BUMDes yang bergerak di bidang penyediaan sumur bor yang disewakan kepada masyarakat petani yang ada di desa tersebut, (3) Pemberdayaan UKM berbasis dana desa selama ini belum dilakukan karena adanya regulasi yang menyatakan bahwa dana desa hanya boleh digunakan untuk pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas, (4) Kendala yang muncul dalam implementasi pemberdayaan UKM berbasis dana desa ini adalah kurangnya sumber daya manusia yang amanah dan profesional baik dalam hal pengelolaan usaha (diversifikasi produk, pemasaran, pembuatan laporan keuangan dan perhitungan pajak penghasilan) maupun dalam hal penguasaan teknologi digital, (5) Ancaman program pemberdayaan di desa Temon dan desa Wates adalah

banyaknya usaha mandiri yang dilakukan oleh pihak swasta bermodal besar dan berteknologi canggih.

Adapun beberapa solusi yang diusulkan untuk meningkatkan program pemberdayaan UKM, antara lain: (1) Memetakan jenis usaha yang sesuai dengan potensi desa Temon dan desa Wates, (2) Menyediakan alat-alat produksi modern yang dibutuhkan UMKM dengan sistem sewa, (3) Membuat *training center* sebagai wadah untuk mencetak tenaga kerja yang amanah dan profesional baik dalam pengelolaan usaha maupun teknologi digital.

Selanjutnya juga disimpulkan bahwa untuk penggunaan Dana Desa dalam pemberdayaan UKM harus dilakukan oleh komunitas yang ada di desa masing-masing seperti Komunitas Petani, Komunitas Majelis Taklim, Komunitas Seniman dan lain-lain. Komunitas tersebut selanjutnya membentuk suatu yang disebut dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dalam kegiatan usahanya dapat menggunakan Dana Desa sebagai salah satu sumber pembiayaannya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini menyimpulkan bahwa secara keseluruhan UMKM yang ada di Kecamatan Boyolali akan tertinggal dengan perusahaan swasta karena beberapa hal yaitu kualitas sumber daya manusia masih rendah, peralatan yang digunakan masih manual, akses pasar dan permodalan sangat terbatas. Selanjutnya sumber pembiayaan yang berasal dari Dana Desa hanya dapat digunakan apabila ada sekelompok masyarakat yang terdiri dari komunitas-komunitas menciptakan usaha baru dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Saran untuk pengabdian berikutnya adalah membuat *training center* sebagai

tempat untuk mengasah berbagai ketrampilan baru terkait dengan pengelolaan usaha, manajemen dan keuangan sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal termasuk teknologi informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, H. (2019). Penyebab Kemiskinan dan Definisinya yang Wajib diketahui. *Liputan 6*. Edisi 8 April 2019
- Dahlan, M. (2017). Peran Pengabdian Masyarakat dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 81–86.
- Hidayat, E. (2016). Kontribusi Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. *CNN Indonesia*. Edisi 21 November 2016
- International Finance Corporation-World Bank Group. (2016). *UKM yang dimiliki Wanita di Indonesia: Kesempatan Emas untuk Institusi Keuangan Lokal (Studi Penelitian Pasar)*. Jakarta
- Imron, I., Suaedy, M. S., & Ribawanto, H. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(3), 485–481.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2010). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)*, Penerbit: IAI, Jakarta
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (2014). Republik Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Retrieved from <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20171106-094054-7086.pdf>